

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasannya mengapa cara melakukan sesuatu atau hasil tertentu lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan cara atau hasil yang berbeda. Nilai mencakup hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang mencerminkan pemikiran seseorang mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia, terutama terkait dengan kebaikan dan tindakan yang membawa kebaikan. Nilai berarti sifat-sifat atau hal-hal yang berguna dan penting bagi manusia (Surawardi, 2021: 82).

Milton Rekeach dan James Bank mengatakan, nilai adalah jenis kepercayaan yang berbeda dalam sistem kepercayaan, di mana seseorang melakukan tindakan atau menghindari tindakan tertentu, atau memiliki serta dipercaya (Surawardi, 2021: 81). Louis D. Kattsof menginterpretasikan nilai dengan tiga hal berikut: *pertama*, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak bisa didefinisikan secara pasti, meskipun kita dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas tersebut melalui objeknya. Dengan demikian, nilai tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga memiliki tolok ukur pasti yang terkandung dalam esensi objek itu. *Kedua*, nilai adalah sesuatu yang penting, yaitu sesuatu yang ada di dalam kehidupan nyata atau di dalam pikiran seseorang. *Ketiga*, nilai sebagai hasil dari pemberian, artinya nilai ini diciptakan oleh situasi kehidupan (Maarif, 2007: 114).

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nilai tidak berarti adanya karena manusia membutuhkannya, tetapi itu berarti bahwa ada. Ini hanya berarti bahwa esensi tersebut semakin meningkat seiring dengan daya tahan pemenuhan manusia. Oleh karena itu, nilai adalah sesuatu yang dipikirkan manusia sebagai subjek yang mencakup segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai konsep, perspektif, atau tujuan dari berbagai pengalaman dengan perilaku yang ketat (Rambe, 2020: 94).

Nilai merupakan dorongan dalam kehidupan yang memberikan makna dan pengakuan terhadap tindakan seseorang. Nilai memiliki dua aspek, yaitu intelektual dan emosional. Kedua aspek ini menentukan nilai dan peran sesuatu dalam kehidupan. Norma atau prinsip adalah gabungan elemen intelektual dan emosional yang dominan dalam memberikan makna dan pengabsahan terhadap suatu tindakan. Prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, dan persaudaraan akan menjadi suatu nilai apabila diwujudkan dalam perilaku serta pola pikir suatu kelompok sosial. Dengan demikian, norma memiliki sifat yang universal dan absolut, sedangkan nilai bersifat khusus dan relatif, tergantung pada individu atau kelompok yang memegangnya (Rambe, 2020: 95).

Nilai dianggap berharga oleh seseorang hanya saja jika nilai tersebut signifikan baginya. Artinya, sesuatu yang berharga bagi seseorang mungkin tidak berharga bagi orang lain. Ini karena nilai sangat penting dalam hubungan antara subjek dan objek dalam kehidupan. (Akmal, 2021: 13-14).

Sehingga nilai bisa diartikan sebagai suatu bentuk kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok masyarakat, digunakan sebagai pedoman dalam bertindak, dan telah terbentuk dalam sistem kepercayaan tertentu yang dipegang oleh individu yang meyakinkannya.

Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan dapat dirasakan oleh setiap orang sebagai motivasi atau prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Nilai juga dapat terwujud dalam tingkah laku, sikap, dan cara berpikir seseorang. Nilai juga dapat ditanamkan dalam diri seseorang selama proses sosialisasi dan melalui berbagai sumber dan metode, seperti keluarga, lingkungan, pendidikan, dan agama.

Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai yang bermanfaat, berguna dan bernilai dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan ajaran agama Islam. (Rambe, 2020: 98).

2. Macam-macam Nilai

Nilai berdasarkan klasifikasi dibagi menjadi berbagai kategori, diantaranya yaitu:

- a. Nilai-nilai agama Islam dibagi menjadi tiga bagian: nilai keimanan, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Nilai-nilai ini juga

dianggap sebagai nilai tertinggi dari ajaran agama Islam. Penggolongan ini didasarkan pada apa yang Nabi Muhammad SAW katakan kepada malaikat jibril tentang iman, islam, dan ihsan, yang sama pentingnya dengan akidah, syari'ah, dan akhlak.

- b. Nilai dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya: yaitu nilai ilahiyah, yang artinya berasal dari Allah SWT, dan nilai inasiah, yang artinya berasal dari perkembangan peradaban manusia. Kedua nilai ini kemudian membentuk norma atau kaidah kehidupan yang dianut dan ditetapkan oleh masyarakat yang mendukungnya (Ahmad, 2019: 207-208).
- c. Selanjutnya, dalam analisis teori nilai, dua jenis nilai pendidikan dikenal sebagai nilai instrinsik dan instrumental. Penjelasannya ialah nilai instrumental adalah nilai yang dianggap baik karena berguna untuk hal lain. Nilai instrinsik adalah nilai yang dianggap baik hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk hal lain (Akmal, 2021: 15-16).
- d. Menurut sifatnya, nilai dapat dibagi menjadi tiga kategori:
 - 1) Nilai subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi antara subjek dan objek; ini sangat bergantung pada pengalaman subjek.
 - 2) Nilai subjektif rasional (logis), yaitu nilai-nilai yang merupakan esensi dari sesuatu yang dapat diketahui secara logis dengan akal sehat, seperti nilai kemerdekaan, kesehatan, keselamatan, badan dan jiwa, perdamaian, dan sebagainya.
 - 3) Nilai objektif, yaitu nilai-nilai yang ternyata dapat menyusun kenyataan, seperti nilai agama (Akmal, 2021: 16).

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai nilai dilihat dari perspektif yang berbeda ada empat pengklasifikasian yaitu, nilai dilihat dari segi komponen utama agama islam, dilihat dari sumber, dilihat dari analisis teori nilai, dan dilihat dari sifat nilai.

B. Teori Nilai-Nilai Pancasila

Menurut Kaelan dan Zubaidi, karena Pancasila merupakan dasar filsafat negara, dan karena itu merupakan sistem nilai, sila-sila Pancasila pada dasarnya

merupakan kesatuan (Asmaroini, 2016: 3). Pancasila mengandung sejumlah nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal dan objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat diterima serta diakui secara luas oleh negara-negara lain. Namun demikian, Pancasila juga memiliki sifat subjektif karena nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia (Nurapriliana & Dewi, 2021: 450).

Nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk pandangan hidup yang menjadi landasan dasar bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga menjadi sumber motivasi dalam berbagai tindakan sehari-hari, serta dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, penerapan nilai-nilai Pancasila harus terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena jika nilai Pancasila terwujud dalam peraturan perundang-undangan, maka seluruh masyarakat akan dibimbing dalam suatu sistem hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Pandangan hidup berperan penting dalam mempersatukan rakyat Indonesia dan memberikan arah untuk menciptakan kehidupan yang damai. Tanpa memiliki pandangan hidup, bangsa Indonesia akan sulit menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi pedoman yang kuat dalam berperilaku luhur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki visi dan misi untuk membentuk kepribadian setiap warga negara yang tetap memegang nilai-nilai Pancasila. Ini menjadi langkah awal dalam membentuk masyarakat yang mampu membangun budaya berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami dan memiliki pemahaman tentang penerapan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia (Lumintang dkk, 2023: 240-242).

Nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

A. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan)

Dalam sila pertama ini, jelas bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang menganut monotheisme, yaitu percaya hanya kepada satu Tuhan. Dengan kata lain, negara Indonesia didirikan berdasarkan iman dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila pertama dari Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang sesuai dengan agama. Beragama itu seharusnya tidak bersifat berlapis-lapis, tetapi harus bersikap adil antar sesama manusia, serta menghargai toleransi antar umat beragama. Karena itu, sebagai orang yang beragama dan percaya kepada Tuhan, kita wajib menumbuhkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, serta kejujuran, sehingga dapat meningkatkan moral masyarakat. (Nuraprilia & Dewi, 2021: 451-455).

Sari, L. K., dan Dewi (2021: 119-124) mengatakan, sila ini menggambarkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang terdiri dari prinsip-prinsip asasi, yaitu;

- 1) Kepercayaan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kebebasan beragama dan menganut agama yang dipercayainya, sebagai hak asasi bagi manusia.
- 3) Perilaku toleransi antar umat beragama.
- 4) Tidak memaksakan agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

B. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta martabat setiap individu sebagai makhluk yang beradab. Sila ini mencerminkan kesadaran moral dan perilaku manusia yang dilandasi oleh norma-norma sosial dan kebudayaan, baik dalam relasi dengan diri sendiri, sesama, maupun lingkungan sekitar.

Pada sila ini terkandung prinsip asasi, yaitu;

- 1) Memiliki rasa cinta terhadap sesama manusia dengan prinsip kemanusiaan.
- 2) Kejujuran.
- 3) Kesamaderajatan manusia
- 4) Keadilan (Nuraprilia & Dewi, 2021: 451-455).

Dapat disimpulkan bahwasannya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini menunjukkan bahwa manusia secara sama memiliki kedudukan dihadapan hukum.

C. Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia datang dari kata "satu", yang artinya utuh, tidak terpecah belah. Istilah persatuan berarti berkumpulnya berbagai jenis dan bentuk yang beragam menjadi satu kesatuan. Maka, persatuan bangsa Indonesia adalah kerja sama antar warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia bersatu karena berusaha mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, dalam kerangka negara merdeka dan berdaulat.

Manusia secara alami adalah makhluk yang individu dan juga sosial. Oleh karena itu, manusia memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain mencakup perbedaan suku, ras, golongan, serta agama. Jika dilihat dari banyaknya keragaman ini, maka negara kita menjunjung persatuan dalam satu kesatuan, yaitu dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Pada sila ini terkandung didalamnya prinsip asasi, yaitu;

- 1) Persatuan
- 2) Kebersamaan
- 3) Rasa cinta terhadap tanah air
- 4) Cinta negara
- 5) Bhinneka Tunggal Ika (Nurapriliana & Dewi, 2021: 451-455).

D. Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerkayatan berasal dari kata "rakyat", yang berarti sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Dalam hubungan keempat, kerakyatan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerkayatan juga disebut sebagai kedaulatan rakyat, yang berarti rakyat memiliki kekuasaan atau berdaulat, atau disebut demokrasi, yaitu rakyat yang memerintah. Artinya, rakyat menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan, dan setiap

keputusan yang diambil dilakukan dengan tanggung jawab, baik kepada Tuhan yang maha esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Dalam sila ini terdapat nilai demokrasi dalam kehidupan negara, adanya kerja sama dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, serta sikap jujur bersama.

Pada sila ini didalamnya terkandung prinsip asasi, yaitu;

- 1) Kerakyatan
- 2) Musyawarah mufakat
- 3) Demokrasi (Nuraprilia & Dewi, 2021: 451-455)

E. Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya sikap adil dalam kehidupan bermasyarakat, yang menuntut keseimbangan dan ketidakberpihakan. Makna utama dari sila ini adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara bertanggung jawab, dengan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Prinsip keadilan dalam sila ini harus berpijak pada hakikat keadilan kemanusiaan, yang mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, masyarakat, dan Tuhan. Sila ini juga mencerminkan upaya menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, dengan pemanfaatan kekayaan negara untuk kesejahteraan bersama serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Ada pengaruh nilai keadilan yang harus terwujud, yaitu:

- 1) Ikatan keadilan antara warga negara terhadap warga negaranya sendiri.
- 2) Keadilan antara masyarakat negara terhadap negaranya
- 3) Keadilan antara masyarakat negara yang satu dengan masyarakat negara yang lainnya.

Didalam sila ini terkandung prinsip asasi, yaitu;

- 1) Keadilan
- 2) Keadilan sosial
- 3) Kekeluargaan

4) Gotong royong (Nurapriliana & Dewi, 2021: 451-455).

Kelima nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengarah pada tujuan yang sama. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama sekaligus sumber motivasi dalam bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila seharusnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena dengan demikian, Pancasila dapat menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bersikap dan bertindak sesuai hukum yang selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai pokok kaidah fundamental bagi negara dan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan norma dasar, hukum tertinggi, dan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pencantuman Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang menjadi pijakan dalam mengatur kehidupan kenegaraan. Pancasila juga mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena nilai-nilainya telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pandangan hidup, tetapi juga falsafah dan arah tujuan hidup bangsa Indonesia.

Hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang membedakannya dari hukum di negara lain. Di Indonesia, hukum didasarkan pada keagamaan, sedangkan di negara sekuler hukum tidak didasarkan pada keagamaan. Hal ini menyebabkan adanya hukum yang bertentangan dengan nilai keagamaan, seperti legalisasi aborsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai

landasan fundamental dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.

C. Teori Nilai-nilai Pancasila Sila Ke- 3 Persatuan Indonesia

1. Pengertian Nilai Pancasila Sila Ketiga Persatuan Pancasila

Sila ketiga memiliki nilai "Persatuan Indonesia" yang menghubungkan semua sila lainnya karena semua sila saling berkaitan satu sama lain. Semua sila sudah disusun secara sistematis dan saling terkait. Dalam sila persatuan ini, dasarnya adalah sila pertama yaitu ketuhanan, sila kedua yaitu kemanusiaan, dan sila ketiga ini juga menjadi dasar bagi sila keempat yaitu kerakyatan dan sila kelima yaitu keadilan. (Astardinata, 2023: 376-377).

Sila ketiga berisi bahwa persatuan mengandung bahwa negara nusantara ini merupakan hasil dari manusia yang monodualis, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam sila ketiga yang dijiwai oleh sila pertama dan kedua, untuk mencapai negara persatuan yang damai diperlukan adanya nasionalisme dan nasionalisme religious. Untuk mencapai negara persatuan diperlukan aspek nasionalisme yang kuat dengan tujuan bersatu. (Astardinata, 2023: 376-377).

Persatuan adalah gabungan dari beberapa bagian yang berbeda. Persatuan Indonesia bertujuan untuk melihat diri sendiri secara jujur dari perspektif luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan yang panjang dalam sejarah dan terdiri dari berbagai kelompok suku dan bangsa. Perbedaan antar kelompok ini bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi justru menjadi alasan untuk mencapai persatuan yang kuat di Indonesia (Ardhani: 2022).

Nilai persatuan di Indonesia berarti kita bersatu sebagai satu bangsa untuk memperkuat keberadaan rakyat. Ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia menghargai dan menerima keberagaman yang ada di dalam bangsa Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki semangat mencintai tanah air dan siap berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ketika diperlukan (Ardhani: 2022).

Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila, merupakan fondasi fundamental bagi bangsa Indonesia. Esensi sila ini, terletak pada nasionalisme dalam berbangsa

dan bernegara. Nasionalisme adalah lebih dari sekedar patriotisme, itu juga berarti memprioritaskan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok (Saputra, 2024: 592).

Persatuan bangsa Indonesia bisa diwakili oleh "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Persatuan Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui persatuan ini, tercapai perdamaian antar sesama warga. Semangat persatuan merupakan hal utama dalam terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, persatuan harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia tetap hidup aman dan damai. (Sari & Najicha, 2022:55).

Karena sifat kodrat mereka sebagai individu dan sosial, manusia memiliki perbedaan secara individu, suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mendorong persatuan negara, meskipun konsekuensinya beragam (Kartini & Dewi, 2021: 155).

Oleh karena itu, sila ketiga Pancasila memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena nilai sila ketiga ini harus menjadi pedoman untuk menghadapi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nilai yang tersemat dalam sila persatuan Indonesia yaitu (Saputra, 2024: 590) :

- A. Meningkatkan sifat nasionalisme dan cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara. Rasa nasionalisme dan cinta tanah air membantu kita memahami perbedaan dalam keberagaman budaya kita.
- B. Mengembangkan sikap saling menghormati antarsuku, agama, ras dan antar golongan. Perpecahan sangat rentan di Indonesia, yang memiliki banyak suku, etnis, ras, dan agama yang berbeda. Untuk mencapai persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini akan membantu kita mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain
- C. Meningkatkan kesadaran kita dalam membina persatuan dan kesatuan. Kita semua sama, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita dapat memperbaiki Indonesia dengan perbedaan ini. Saling membantu, berbagi, dan bekerja sama tanpa memperhatikan perbedaan.

2. Penerapan Nilai Pancasila Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Sila Persatuan tidak hanya tertuang di dalam teks Pancasila, dalam kehidupan masyarakat dan negara dapat diwujudkan melalui tujuh butir pengamalnya (Saputra, 2024 : 592-593):

- 1) Memprioritaskan Persatuan dan Keselamatan Bangsa: Menempatkan kepentingan bersama, persatuan, dan kesatuan di atas kepentingan individu dan kelompok. Hal ini berarti mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap tindakan dan keputusan.
- 2) Semangat Pengorbanan: Apabila diperlukan, siap untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Semangat ini ditunjukkan melalui kontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun pemikiran.
- 3) Cinta Tanah Air dan Bangsa: Menumbuhkan dan memelihara rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Rasa cinta ini diwujudkan dengan mempelajari sejarah bangsa, menjaga kelestarian budaya, dan senantiasa berusaha untuk kemajuan bangsa.
- 4) Kebanggaan Berbangsa dan Bertanah Air: Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kebanggaan ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi nama bangsa di kancah internasional, menggunakan produk-produk dalam negeri, dan senantiasa menjaga kehormatan bangsa.
- 5) Memelihara Ketertiban Dunia: Berpartisipasilah dengan upaya untuk memelihara ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya perdamaian internasional, menghormati kedaulatan negara lain, dan terlibat dalam aksi kemanusiaan.
- 6) Memperkuat Persatuan Bhinneka Tunggal Ika: Mengembangkan persatuan Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti menghargai keragaman agama, ras, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara.

- 7) Memperbaiki Pergaulan Demi Persatuan: Menjalin, memperbaiki, dan memperkuat pergaulan demi persatuan dan kesatuan negara. Hal ini dilakukan dengan menjalin komunikasi dan kerjasama antar individu, kelompok, dan organisasi, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Persatuan Indonesia menuntut persatuan seluruh elemen bangsa, termasuk di lingkungan pendidikan. Penerapan nilai-nilai persatuan dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti (Saputra, 2024: 591) :

- a. Perilaku menjunjung tinggi persatuan: seluruh elemen pendidikan, mulai dari guru, staf, hingga peserta didik, harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam keseharian mereka. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama membedakan-bedakan suku, ras, agama, atau golongan
- b. Kerjasama untuk kemajuan bersama: lembaga pendidikan harus memupuk budaya kerja sama antar individu dan kelompok. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai banyak kegiatan, seperti proyek tim, kegiatan ekstrakurikuler, gotong royong dan sebagainya.
- c. Menumbuhkan rasa cinta tanah air: menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran sejarah, budaya dan nilai-nilai kebangsaan.

Penerapan nilai-nilai persatuan dalam lingkungan sekolah diantaranya adalah (Saputra, 2024: 590-591):

- Tidak bersikap rasis di sekolah
- Tidak memiliki teman berdasarkan suku, ras atau golongan.
- Sebelum pembelajaran dimulai, menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu
- Upacara bendera merah putih setiap hari Senin, serta hari besar di Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan.
- Melalui kegiatan Pramuka dapat membentuk karakter nasionalisme

D. Teori *Good citizenship*

1. Pengertian *Good citizenship*

Menurut As Hikam Ghazali yang dikutip oleh Winarno (2009: 48) definisi warga negara sebagai terjemahan dari *citizen* berarti anggota komunitas Negara dan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan berwujud peran, hak dan kewajiban secara timbal balik, seperti halnya anggota organisasi memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anggota.

Teori bahwa warga negara yang baik (*good citizenship*) adalah negara yang taat akan hukum. Menurut Soekanto yang dikutip oleh Robertus Kristianto Naku (2023), menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsep abstrak dimiliki oleh manusia tentang keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau yang sepantasnya.

a) Unsur-unsur untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*)

Cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah setiap orang Indonesia yang memiliki jiwa warga negara yang baik. Berikut unsur-unsur untuk menjadi warga negara yang baik:

- 1) Bertuhan (beriman dan bertakwa), artinya warga negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi sebagai maha pencipta, dengan wujud sikap sebagai umat beragama dan beriman, serta menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Cara pandang nasional (berpikir dan berperilaku sesuai ideologi kebangsaan), artinya pemikiran dan perilaku setiap warga Negara berpedoman pada ideologi kebangsaan yaitu Pancasila. Ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, keadilan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila (nasionalisme).
- 3) Berjiwa besar, artinya warga negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan umum.
- 4) Berjiwa integritas, artinya warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang tidak menjaga Kesatuan Bangsa Indonesia (patriotisme)

Berdasarkan unsur-unsur warga negara yang telah disebutkan diatas, itu sudah termaktub di 45 butir pengamalan Pancasila yang ada di buku kecil UUD '45, berikut 45 butir pengamalan Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin berbagai hak konstitusional warga negara yang mencerminkan ciri-ciri warga negara yang baik. Beberapa ketentuan yang mengatur hak-hak tersebut antara lain:

- Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menegaskan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
- Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 27 ayat (3) (setelah perubahan kedua) menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam ikut serta membela negara.
- Pasal 28 menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.
- Pasal 29 ayat (2) menyatakan hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- Pasal 30 ayat (1) memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- Pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.

Keseluruhan pasal-pasal tersebut mencerminkan penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, yang menjadi pilar penting dalam pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Meskipun hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 merupakan hak dan kewajiban secara hukum, mereka juga memiliki hak

dan kewajiban sebagai warga negara, seperti nilai-nilai agama, komunikasi dan tindakan sosial, dan tradisi lokal.

a) Ciri-ciri warga negara yang baik (*good citizenship*)

Ciri-ciri atau sifat warga negara yang baik, di antaranya: 1) memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2) memahami prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan nasional dan internasional. 3) mematuhi hukum dan membayar pajak. 4) menghormati orang lain dan harta benda mereka. 5) mengetahui isu-isu terkini. 6) menghargain dan menghormati setiap perbedaan. 7) saling membantu atau gotong royong. 8) menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan 9) menyelesaikan masalah dengan perdamaian (Saputra: 2023).

Secara umum, tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membuat semua warga negara menjadi warga negara yang baik, yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, social, maupun spiritual, memiliki rasa bangga diri dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk membangun negara yang baik dengan pemerintahan yang baik dan tidak tertinggal zaman, para pemerintahan dan seluruh masyarakat harus membangun *citizenship* yang baik.

2. Upaya Pembentukan *Good citizenship* Melalui PPKn

Tujuan tingkat satuan pendidikan di Indonesia adalah Karakter warga negara yang baik merupakan hasil dari proses pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan secara menyeluruh. Meskipun terdapat beragam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, seluruhnya menunjukkan bahwa pembentukan karakter warga negara yang baik tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Aristoteles, warga negara tidak termasuk golongan mekanik maupun pedagang, karena cara hidup mereka dipandang bertentangan dengan prinsip kebijaksanaan. Warga negara yang ideal adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir rasional dan karakter yang baik, sehingga mampu mengarahkan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta layak memperoleh kepercayaan untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara

(Nanang, 2020: 248-266). Karena pada hakikatnya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada diri manusia.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan bertabiat, pendidikan Pancasila sebagai pendidikan berkarakter bagi setiap warga negara Indonesia memiliki peran penting. Untuk mencegah timbulnya radikalisme yang membahayakan negara, mata pelajaran Pancasila diberikan kepada siswa sebagai sarana pengembangan karakter, watak, dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, untuk memastikan bahwa semua siswa memahami bahwa semua siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Orang-orang yang diperlukan untuk membimbing kehidupan mereka ke arah kebijakan dan mendapatkan kepercayaan negara (Gustaman dan Nurholis, 2022: 5-6),

Sikap warga negara yang baik (*good citizenship*), sifat warga negara yang baik, dapat diterapkan melalui media sosial, yang sangat dikuasai oleh generasi muda saat ini. Di era disrupsi (perubahan besar-besaran yang terjadi akibat inovasi dan penggunaan teknologi baru), media sosial memiliki potensi yang sangat besar, ide-ide yang diunggah di sana tidak hanya bergema di media sosial itu saja, tetapi juga mampu membawa konkretisasi terhadap kehidupan nyata (Mu'ammam, 2019). Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan adalah dengan bertindak sebagai warga negara yang baik (Fajar & Dewi, 2021: 82).

Pendidikan kewarganegaraan terkait dengan upaya untuk mengubah warga negara yang kurang baik. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan telah diberikan. Dalam pengajaran kewarganegaraan. Ini harus dilakukan setiap hari. Hal ini disebabkan fakta bahwa warga negara akan terus bertambah setiap hari, sehingga penerapan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan secara konsisten untuk menghasilkan warga negara yang bersemangat. Pendidikan kewarganegaraan harus relevan dengan kemajuan zaman karena dapat menumbuhkan karakter dan moral bangsa dan berhubungan dengan masalah sosial kemasyarakatan (Erfiana & Ariyanto, 2020:79-95). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan ini akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan masalah yang dihadapi masyarakat (Fajar & Dewi, 2021: 89).